

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada PP Republik Indonesia No.71 tahun 2010 “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran menjelaskan klasifikasi jenis belanja, salah satunya belanja modal. Pada belanja modal ini dapat dipergunakan antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan jaringan, dan juga belanja modal lainnya. Belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Putri & Rahayu (2019) menjelaskan bahwa “pengukuran belanja modal diformulasikan dengan total belanja modal dibagi total belanja daerah”. Menurut Andriyani et al., (2020) “belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung pemerintah”.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran

belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Dari pemaparan pengertian belanja modal di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa belanja modal merupakan kegiatan suatu badan pemerintahan yang berupa pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana.

2. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk diukur.

Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Andriyani et al., 2020).

Berdasarkan pemaparan pengertian kinerja keuangan di atas, maka kesimpulannya yaitu kinerja keuangan merupakan pengukuran

kinerja suatu laporan keuangan dengan menggunakan indikator keuangan. Menganalisis kinerja keuangan ini juga dapat berguna untuk menilai kinerja di masa lalu sehingga memperoleh posisi keuangan yang relevan.

3. Tingkat Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Andriyani et al., (2020) “analisis kinerja keuangan dapat diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan”.

Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah dalam artikel Andriyani et al., (2020) antara lain sebagai berikut:

a. Tingkat Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan merupakan “pertambahan volume, massa, tinggi, atau ukuran lainnya yang dapat dinyatakan dalam bilangan atau secara kuantitatif” (Ferdinand & Ariwibowo, n.d.).

Pendapat yang dikemukakan oleh Andriyani et al., (2020) mengenai manfaat dari analisis pertumbuhan pendapatan yaitu bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Begitu juga sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi

makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik (Andriyani et al., 2020). Berikut rumus tingkat pertumbuhan PAD dalam artikel Andriyani et al., (2020) :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

b. Tingkat Kemandirian

Rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Menurut pendapat Saputra, Sandy Candra et al., (2018) semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat kemandirian dalam artikel Saputra, Sandy Candra et al., (2018) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Tingkat Efektivitas

“Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target tahunan PAD dalam APBD” (Novikasari & Zulkarnain, 2020).

Menurut Fitra et al., (2020) tingkat efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) memperlihatkan kemampuan pemerintah

daerah kabupaten atau kota untuk merealisasikan dan mencapai target penerimaan PAD.

Tingkat efektivitas dalam artikel Fitra et al., (2020) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

| Persentase Kinerja | Kriteria |
|--------------------|----------------|
| > 100% | Sangat Efektif |
| 100% | Efektif |
| 90% - 99% | Cukup Efektif |
| 75% - 89% | Kurang Efektif |
| < 75% | Tidak Efektif |

Sumber: Andriyani et al., (2020)

d. Tingkat Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur *input* digunakan dan membandingkan dengan *output* yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan.

Andriyani et al., (2020) mengartikan “rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah”.

Rasio untuk mengukur apakah kegiatan pemerintah sudah dilaksanakan secara efisien atau belum, dengan cara menghitung rasio antara *output* dengan *input*.

Lalu menurut Linawati & Solikah (2019) “semakin besar *output* dibandingkan dengan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya”.

Rumus tingkat efisiensi dalam artikel Andriyani et al., (2020) yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

| Persentase Efisiensi | Kriteria |
|----------------------|----------------|
| > 100% | Tidak Efisien |
| 90% - 100% | Kurang Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efisien |
| 60% - 80% | Efisien |
| < 60% | Sangat Efisien |

Sumber: Bisma dan Hery (2010) dalam Andriyani et al., (2020)

e. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin dan memerlukan anggaran yang besar. Menurut (Linawati & Solikah, n.d.) “belanja modal dipergunakan untuk pembelian atau pengadaan dan atau pembangunan aset tetap yang

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan digunakan untuk pelayanan publik”.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Alokasi belanja modal dalam artikel Fitra et al., (2020) dapat dihitung dengan menggunakan rumus belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan berbeda, maka dapat banyak hal yang sama sehingga dapat dijadikan referensi untuk melengkapi. Berikut beberapa ringkasan penelitian terdahulu:

1. Andriyani et al., (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal. Analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi secara simultan terhadap belanja modal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio pertumbuhan PAD terhadap belanja modal. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap belanja modal. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas terhadap belanja modal. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi terhadap belanja modal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2. Putri & Rahayu (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017). Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD serta belanja modal selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan kinerja keuangan berupa derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
3. Wibisono et al., (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-

Bakorwil Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, efisiensi keuangan terhadap belanja modal secara parsial dan simulta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi KD berpengaruh pada belanja modal. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Novita & Nurhasanah (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017). Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio ruang fiskal, rasio tingkat pembiayaan silpa dan rasio kontribusi BUMD serta pengaruhnya terhadap rasio belanja, baik secara parsial maupun simultan terhadap alokasi belanja modal dalam APBD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Secara parsial menunjukkan bahwa rasio ketergantungan, efektivitas, efisiensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal.

5. Oktavianti & Idayati (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan rasio Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dan Desentralisasi Fiskal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengukuran *variable-variable* di atas mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dihasilkan bahwa Ukuran Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul | Teknik Analisis Data | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------------|--|--|---|
| 1. | Andriyani et al., (2020) | Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal | Metode analisis dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan bantuan <i>E-Views</i> versi 8.0 | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. |
| 2. | Putri & Rahayu (2019) | Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017) | Metode analisis dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan menggunakan bantuan <i>software E-Views</i> versi 9.0 | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi, keuangan, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap belanja modal. |
| 3. | Wibisono et al., (2021) | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Bakorwil Madiun | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif kuantitatif. Dengan bantuan <i>software SPSS</i> versi 20. | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi KD berpengaruh pada belanja modal. |
| 4. | Novita & Nurhasanah, (2017) | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja | Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan bantuan <i>software E-</i> | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. |

| | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|
| | | Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017) | Views versi 8.0 | Secara parsial menunjukkan bahwa rasio ketergantungan, efektivitas, efisiensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal. |
| 5. | (Oktavianti & Idayati, 2020) | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur | Metode analisis dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan bantuan SPSS | Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dihasilkan bahwa Ukuran Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. |

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal Berdasarkan LRA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Peningkatan pada PAD ini akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Maka semakin meningkatnya pertumbuhan PAD pada daerah tersebut, akan semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

2. Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Belanja Modal Berdasarkan LRA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah tersebut akan semakin tinggi pula alokasi belanja modal yang nantinya dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas publik yang layak. Putri & Rahayu (2019) juga berpendapat bahwa “suatu daerah yang dikatakan dapat meningkatkan tingkat kemandirian, yaitu daerah yang dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik”.

3. Pengaruh Tingkat Efektivitas terhadap Belanja Modal Berdasarkan LRA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tingkat efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Anggaran yang sudah ditargetkan dalam periode tertentu, seharusnya dialokasikan secara efektif dan tepat waktu sehingga pemerintah daerah dapat melakukan belanjanya sesuai dengan yang ditargetkan.

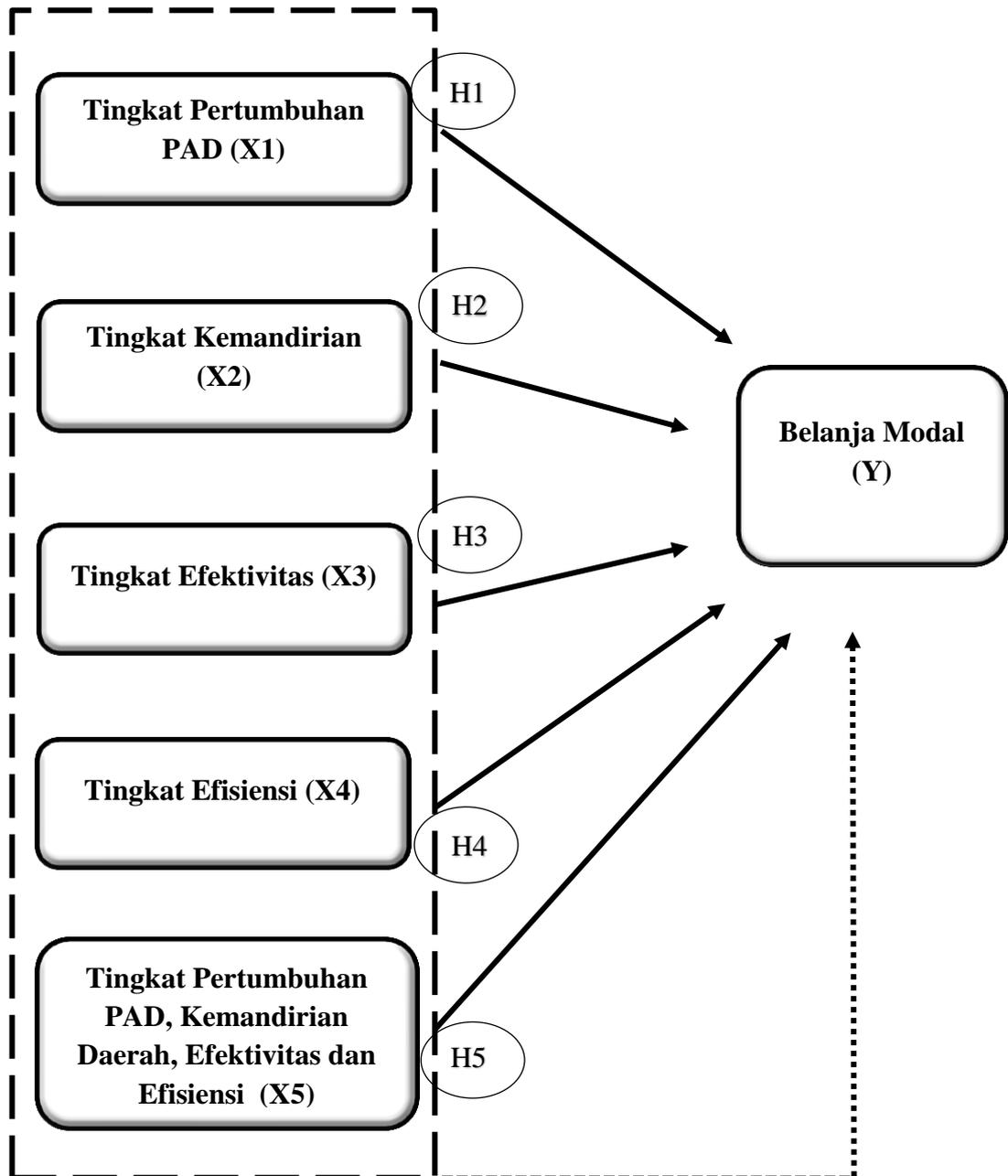
Sama halnya dengan pendapat yang diungkapkan oleh Andriyani et al., (2020) yaitu semakin tinggi tingkat efektivitas maka pemerintah daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya.

4. Pengaruh Tingkat Efisiensi terhadap Belanja Modal Berdasarkan LRA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Semakin tinggi tingkat efisiensi, maka pengeluaran daerah dalam hal ini belanja modal semakin menurun. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak digunakan secara maksimal untuk belanja modal.

Hal tersebut juga sependapat dengan Wibisono et al., (2021) yang menyatakan pemda biasanya terlalu banyak alokasi untuk belanja pegawai yang kurang membawa manfaat untuk kepentingan publik. Seharusnya belanja daerah diprioritaskan untuk belanja modal untuk pembangunan daerah yang bisa berakibat pada peningkatan pendapatan daerah dan mampu menarik minat investor.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka variabel-variabel yang berkaitan dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

→ : Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel
Dependen

-----► : Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
secara bersama – sama

D. Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, untuk menguji pengaruh Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga Tingkat Pertumbuhan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dalam LRA Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2020-2021.
- H2: Diduga Tingkat Kemandirian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dalam LRA Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2020-2021.
- H3: Diduga Tingkat Efektivitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dalam LRA Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2020-2021.
- H4: Diduga Tingkat Efisiensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dalam LRA Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2020-2021.
- H5: Diduga Tingkat Pertumbuhan PAD, Tingkat Kemandirian, Tingkat Efektivitas, dan Tingkat Efisiensi secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Modal dalam LRA Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2020-2021.

